

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT

Z Zulkarnain

Program Studi Akuntansi, Institut Manajemen Wiyata Indonesia
zulkarnain@imwi.ac.id

ABSTRACT

Measurement of the financial performance of local governments can show the financial condition of local governments and the ability of the region to explore and manage the existing sources of funds. A good regional financial performance can be seen from its effectiveness in exploring regional potentials, lower dependency on the central government, and a larger portion of PAD to finance regional development. This study seeks to measure the financial performance of the District-City Government in West Java by using a regional financial ratio measurement tool, which consists of the Fiscal Decentralization Ratio, the Regional Government Financial Dependency Ratio, the PAD Effectiveness Ratio, and the Capital Expenditure Ratio. The results of the measurement of the Fiscal Decentralization Ratio concluded that the financial capacity of the Regency-City Government in West Java is still classified as "LESS". The measurement results of the Regional Government Financial Dependency Ratio concluded that there were no local governments whose financial dependence on transfer funds falls into the "LOW" category. The results of the measurement of the PAD Effectiveness Ratio concluded that the majority of local governments in West Java had been effective and very effective in realizing the PAD target. And the results of the Capital Expenditure Ratio measurement concluded that there had been efforts from the District-City Government in West Java to maximize Capital Expenditures. This study has several limitations. Subsequent research can add the scope of testing or assessment to be more comprehensive, for example by conducting tests or studies on the determinants of the financial performance of local governments or the impact resulting from the factual conditions of the financial performance of local governments.

Keywords: *financial performance of local governments, fiscal decentralization ratio, regional government financial dependency ratio, PAD effectiveness ratio, capital expenditure ratio.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah atau desentralisasi memberikan kewenangan kepada setiap pemerintahan daerah di Indonesia untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri (Indonesia, 2014, 2015). Otonomi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan menciptakan proses atau pola pengambilan keputusan dalam ranah publik yang lebih baik dan demokratis. Kepala Daerah sebagai tampuk pimpinan tertinggi di daerah bertugas memastikan tercapainya tujuan tersebut, melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, menggali seoptimal mungkin potensi daerah, dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana teori keagenan yang di dalamnya membahas tentang hubungan antara *principal* dan *agent*, rakyat sebagai *principal* memiliki hak untuk mendapatkan performa (kinerja) yang maksimal dari pemerintah daerah sebagai *agent* (Halim & Abdullah, 2006). Pengukuran kinerja

kemudian dilakukan untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi publik pada suatu periode tertentu, sehingga berikutnya dapat digunakan untuk mendorong peningkatan performa di masa depan, atau merancang upaya perbaikan seperlunya.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menunjukkan kondisi keuangan pemerintah daerah dan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber dana yang ada. Mardiasmo (2018) menyatakan pengukuran kinerja (keuangan daerah) dilakukan untuk membantu kinerja pemerintah daerah, mengalokasikan sumberdaya dan pengambilan keputusan, memperbaiki komunikasi kelembagaan, dan mewujudkan pertanggung jawaban publik.

Kinerja keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari efektivitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih rendah, dan porsi yang lebih besar dari PAD untuk membiayai pembangunan di daerah. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyatakan secara rata-rata nasional saat ini PAD masih sangat terbatas, ketergantungan daerah terhadap transfer ke

daerah masih sangat tinggi. Ketergantungan tersebut mencapai 80,1% dan kontribusi PAD hanya sekitar 12,87% (Olivia, 2018).

Provinsi Jawa Barat memiliki sumberdaya alam yang melimpah, memiliki objek atau destinasi wisata yang banyak, dan industri-industri yang tersebar di beberapa Kabupaten-Kota di Jawa Barat. Bahkan di Kabupaten Bekasi beroperasi sedikitnya 4.000 pabrik (Andryandy, 2019). Daerah Cikarang di Kabupaten Bekasi tersebut digadang-gadang sebagai daerah industri terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkali-kali menerima penghargaan sebagai Provinsi dengan Kinerja Terbaik, baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari penyelenggara penghargaan lainnya. Pada peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah (25/4/2019), penghargaan serupa juga diterima oleh dua kota dan satu kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, dan Kota Cimahi (Gewati, 2019). Penghargaan seperti ini menjadi kabar gembira bagi pengelolaan pemerintahan yang baik di daerah.

Lalu bagaimana dengan Kabupaten-Kota di Jawa Barat yang lain? Penelitian ini berupaya untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat dengan menggunakan alat ukur rasio keuangan daerah sebagaimana yang digunakan dalam penelitian oleh Indramawan (2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan Keagenan dalam Pemerintahan Daerah

Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak atau entitas yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (disebut *principal*) dan yang pihak menerima kewenangan (disebut *agent*). Dalam struktur di pemerintahan daerah, rakyat sebagai pihak yang mendelegasikan kewenangan (*principal*) kepada Kepala Daerah (*agent*, disebut pula sebagai eksekutif) dengan konsekuensi diusulkan diberhentikan (melalui legislatif) apabila Kepala Daerah dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan seperti yang diinginkan (Indonesia, 2014, 2015).

Eksekutif memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi. Eksekutif sebagai pelaksana fungsi (operasional) di pemerintahan daerah memiliki pemahaman yang komprehensif tentang administrasi dan birokrasi, serta ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dari seluruh aspek pemerintahan. Eksekutif dalam mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan layanan publik

memiliki kecenderungan untuk mengusulkan anggaran belanja lebih besar dari kondisi aktual yang terjadi (asas maksimal). Sebaliknya untuk usulan anggaran pendapatan, terdapat kecenderungan eksekutif mengusulkan target lebih rendah (asas minimal), supaya pada saat realisasi, target tersebut mudah dicapai. Kondisi dalam usulan anggaran seperti ini memberikan gambaran terdapat asimetri informasi di antara eksekutif (*agent*) dan legislatif (*principal*). Kondisi seperti ini pula terjadi karena *agent* menginginkan posisi yang nyaman dan aman dalam melaksanakan kewajiban dan tugas, serta fungsinya (Halim & Abdullah, 2006).

Kendala asimetri informasi kadang menyebabkan *principal* harus menyiapkan biaya tertentu untuk mengatasi masalah tersebut. Maka sebaiknya informasi apapun yang dimiliki oleh *agent* disajikan secara sepenuhnya (*full disclosure*) dalam laporan keuangan, khususnya informasi yang sangat terkait dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan *principal* (Zulkarnain & Andriansyah, 2018).

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai akuntabilitas insitusi/lembaga/organisasi dalam menghasilkan layanan publik terbaik melalui alat ukur keuangan dan nonkeuangan. Akuntabilitas meliputi kewajiban untuk menyampaikan dengan baik ke publik atas pembelanjaan dana, termasuk pula kewajiban menyampaikan bahwa dana yang dikelola dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dari setiap rupiah dana yang dibelanjakan harus mampu memberikan dampak untuk kepentingan publik, memenuhi kebutuhan publik, dan sesuai tuntutan publik, serta dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik (Halim & Kusufi, 2018).

Pengukuran kinerja bermanfaat bagi organisasi pemerintahan diantaranya (Mardiasmo, 2018):

- a. Dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja manajemen;
- b. Dapat memberi arah pada pencapaian target kinerja;
- c. Digunakan dalam memonitor atau mengevaluasi pencapaian kinerja. Dalam kondisi tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif seperlunya untuk memperbaiki kinerja;
- d. Digunakan sebagai dasar yang objektif untuk pemberian *reward and punishment* dari sistem pengukuran kinerja organisasi yang telah disepakati sebelumnya;

- e. Dapat menjadi alat komunikasi di antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi;
- f. Mampu membantu mengidentifikasi pemenuhan kepuasan masyarakat;
- g. Mampu membantu memahami operasional kegiatan di instansi pemerintahan; dan
- h. Untuk memastikan pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.

Analisis rasio keuangan daerah dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan daerah (Mahmudi, 2016). Rasio keuangan daerah yang bisa digunakan seperti Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal merupakan proporsi jumlah realisasi PAD pada tahun berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016). PAD merupakan bagian Pendapatan Daerah yang diterima dari hasil pemungutan (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (laba dari BUMD), dan (4) Lain-lain PAD yang Sah. Rasio ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi, serta bagi hasil dari BUMD untuk menunjang pendapatan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi Rasio Desentralisasi Fiskal mengindikasikan semakin rendah ketergantungan suatu pemerintahan daerah terhadap pendanaan dari pusat (Indramawan, 2018). Formula dan skala interval dari Rasio Desentralisasi Fiskal sebagai berikut:

Rasio Desentralisasi Fiskal

$$= \frac{\text{Total Realisasi PAD tahun } t}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah tahun } t}$$

Tabel 1

Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah
0 – 10	Sangat Kurang
10 – 20	Kurang
20 – 30	Cukup
30 – 40	Sedang
40 – 50	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber: (UGM, 1991)

Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proporsi jumlah realisasi Pendapatan Transfer pada tahun berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016). Pendapatan Transfer merupakan bagian Pendapatan Daerah yang diterima dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Ada empat jenis transfer pemerintah pusat kepada daerah yaitu, (1) Dana Perimbangan, (2) Dana Otonomi Khusus, (3) Dana Keistimewaan, dan (4) Dana Desa. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah mengindikasikan semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah pada pendanaan dari pusat (Indramawan, 2018). Formula dan skala interval dari Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah

$$= \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Transfer tahun } t}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah tahun } t}$$

Tabel 2

Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Ketergantungan (%)	Ketergantungan Keuangan PD
0 – 25	Sangat Rendah
25 – 50	Rendah
50 – 75	Sedang
75 – 100	Tinggi

Sumber: (UGM, 1991)

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan target anggaran PAD (Mahmudi, 2016). Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dan anggaran PAD. Formula dan skala interval dari Rasio Efektivitas PAD sebagai berikut:

Rasio Efektivitas PAD

$$= \frac{\text{Total Realisasi PAD tahun } t}{\text{Total Anggaran PAD tahun } t}$$

Tabel 3
Skala Interval Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD (%)	Kategori
< 75	Tidak Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
100	Efektif
> 100	Sangat Efektif

Sumber: (UGM, 1991)

Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal dihitung dari perbandingan total Belanja Modal tahun berjalan dengan Belanja Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016). Belanja Modal merupakan bagian dari Belanja Daerah yang dikeluarkan untuk perolehan (pengadaan) aset tetap atau aset lainnya yang dapat digunakan atau memberi manfaat melebihi jangka waktu satu tahun anggaran. Menurut Muda & Naibaho (2018) terdapat dua jenis Belanja Modal, yaitu belanja modal yang pengadaannya dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti untuk pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, dan seterusnya. Kedua, belanja modal yang pengadaannya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu belanja modal untuk menunjang operasional aparatur daerah atau negara, seperti untuk pembangunan gedung pemerintahan, kendaraan dinas operasional, dan seterusnya.

Dalam rasio Belanja Modal tidak dikenal skala interval untuk mengukur baik dan buruknya alokasi. Namun menurut Mahmudi (2016), rata-rata Belanja Modal di pemerintahan daerah di kisaran 5% – 20% dari total Belanja Daerah. Formula dari Rasio Belanja Modal sebagai berikut:

Rasio Belanja Modal

$$= \frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal tahun } t}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah tahun } t}$$

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan pemerintahan daerah yang diperoleh sesuai tujuan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari rekapitulasi data keuangan daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dengan mengakses laman www.djpk.kemenkeu.go.id. Data dimaksud adalah data realisasi Pendapatan Daerah, realisasi Belanja Daerah, realisasi Pendapatan Transfer, anggaran dan realisasi PAD, serta realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat.

Metode Analisis

Perhitungan terhadap data keuangan pemerintah daerah dilakukan disesuaikan dengan rumus yang telah disajikan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap masing-masing rasio keuangan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Subjek Penelitian

Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia yaitu mencapai 45 juta jiwa (Jabar, 2020). Jawa Barat memiliki potensi keragaman budaya yang sangat kaya, memiliki kekayaan alam (*nature*) dengan struktur geologis yang kompleks, berbatasan langsung dengan ibukota Negara, memiliki pusat kegiatan industri (manufaktur) dan strategis nasional, serta memiliki Instalasi Vital Nasional dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan Pertahanan, serta Keamanan.

Tujuh bidang unggulan sebagai penciri Jawa Barat Termaju di Indonesia tahun 2025, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (*beyond the expectation*), akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan;
2. Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan yang berkelanjutan;
3. Masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi;
4. Pengelolaan pertanian dan kelautan;
5. Energi baru dan terbarukan serta pengelolaan sumber daya air;
6. Industri manufaktur, industri jasa, dan industri kreatif; dan
7. Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Terdapat 27 Kabupaten-Kota di Jawa Barat, dengan rincian 18 Kabupaten dan 19 Kota. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten-Kota Tahun 2018 untuk menggambarkan besar pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 4
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten-Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2018

(dalam miliar Rupiah)

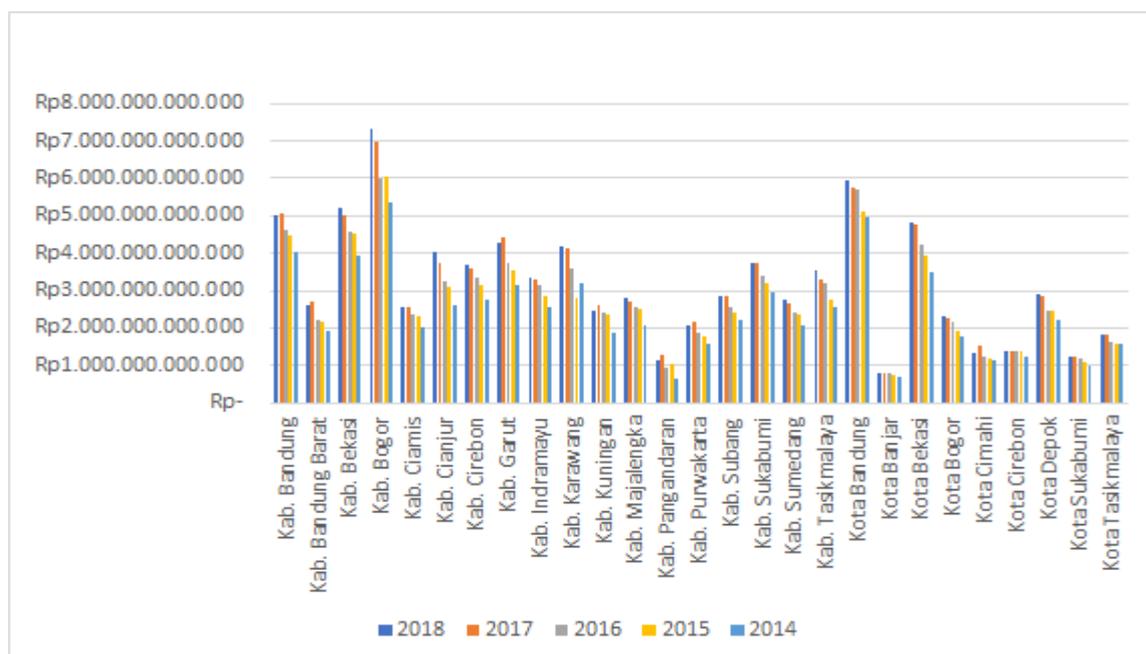
NO	NAMA PEMDA	JUMLAH	TERBESAR KE	NO	NAMA PEMDA	JUMLAH	TERBESAR KE
1	Kab. Bandung	5.001	4	15	Kab. Subang	2.841	14
2	Kab. Bandung Barat	2.602	17	16	Kab. Sukabumi	3.762	9
3	Kab. Bekasi	5.195	3	17	Kab. Sumedang	2.750	16
4	Kab. Bogor	7.300	1	18	Kab. Tasikmalaya	3.558	11
5	Kab. Ciamis	2.574	18	19	Kota Bandung	5.940	2
6	Kab. Cianjur	4.017	8	20	Kota Banjar	800	27
7	Kab. Cirebon	3.683	10	21	Kota Bekasi	4.836	5
8	Kab. Garut	4.301	6	22	Kota Bogor	2.329	20
9	Kab. Indramayu	3.339	12	23	Kota Cimahi	1.316	24
10	Kab. Karawang	4.188	7	24	Kota Cirebon	1.405	23
11	Kab. Kuningan	2.470	19	25	Kota Depok	2.898	13
12	Kab. Majalengka	2.818	15	26	Kota Sukabumi	1.224	25
13	Kab. Pangandaran	1.137	26	27	Kota Tasikmalaya	1.838	22
14	Kab. Purwakarta	2.061	21				

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020

Dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa Kabupaten-Kota dengan realisasi Pendapatan Daerah terbesar (5 besar) pada tahun 2018 yaitu, (1) Kabupaten Bogor; (2) Kota Bandung; (3) Kabupaten Bekasi, (4) Kabupaten Bandung, dan (5) Kota Bekasi. Kota Banjar yang merupakan salah satu kota penerima

penghargaan sebagai Pemerintah Kota dengan Kinerja Terbaik memiliki besar Pendapatan Daerah terkecil dibanding Kabupaten-Kota lain.

Bila disajikan dalam bentuk grafik realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten-Kota di Jawa Barat tahun 2014-2018 sebagai berikut:



Gambar 1
Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten-Kota di Jawa Barat Tahun 2014-2018

Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menggambarkan besar kemampuan daerah dalam membiayai Pengeluaran (Belanja) Daerah dari hasil pemungutan PAD. Berikut

disajikan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten-Kota di Jawa Barat tahun 2014-2018:

Tabel 5
Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat
Tahun Anggaran 2014-2018

(rasio dalam %)

NO	NAMA PEMDA	2018		2017		2016		2015		2014	
		RASIO	PRKT								
1	Kab. Bandung	18,55	11	18,44	19	18,59	11	17,52	12	17,38	13
2	Kab. Bandung Barat	16,23	13	22,40	11	16,78	13	14,60	17	13,01	19
3	Kab. Bekasi	40,32	3	46,31	1	41,92	1	40,77	1	39,44	1
4	Kab. Bogor	38,28	5	43,61	3	38,37	2	33,19	6	31,85	4
5	Kab. Ciamis	9,12	26	8,64	26	8,63	25	7,86	25	9,09	25
6	Kab. Cianjur	14,18	20	14,22	24	14,04	19	14,60	18	15,66	16
7	Kab. Cirebon	15,88	15	21,70	13	15,73	16	15,14	16	16,57	14
8	Kab. Garut	9,79	24	15,65	21	10,28	24	11,84	22	11,85	21
9	Kab. Indramayu	12,58	22	17,61	20	11,22	22	12,04	21	12,73	20
10	Kab. Karawang	27,92	9	33,74	7	28,09	7	37,68	3	28,43	7
11	Kab. Kuningan	12,28	23	14,69	23	10,43	23	9,66	24	10,68	24
12	Kab. Majalengka	15,97	14	19,13	18	12,87	21	11,38	23	10,85	23
13	Kab. Pangandaran	9,78	25	6,61	27	7,15	26	6,31	27	5,01	27
14	Kab. Purwakarta	17,90	12	21,96	12	18,11	12	18,82	11	18,37	11
15	Kab. Subang	14,11	21	20,30	16	14,03	20	13,07	20	11,77	22
16	Kab. Sukabumi	15,03	18	21,32	14	16,12	14	15,86	14	15,53	17
17	Kab. Sumedang	15,72	16	20,81	15	14,45	17	13,89	19	14,46	18
18	Kab. Tasikmalaya	6,98	27	12,10	25	6,73	27	6,78	26	6,01	26
19	Kota Bandung	43,29	1	44,96	2	37,87	4	36,48	4	34,64	2
20	Kota Banjar	14,52	19	15,45	22	14,27	18	16,30	13	17,63	12
21	Kota Bekasi	41,38	2	41,80	6	38,04	3	37,92	2	34,63	3
22	Kota Bogor	39,17	4	42,73	4	36,42	6	32,80	7	31,00	5
23	Kota Cimahi	25,45	10	25,05	10	23,47	10	22,65	10	20,41	10
24	Kota Cirebon	31,34	7	31,93	8	26,44	8	22,79	9	24,19	9
25	Kota Depok	36,56	6	42,52	5	37,09	5	33,23	5	29,86	6
26	Kota Sukabumi	29,61	8	29,52	9	25,39	9	25,95	8	25,93	8
27	Kota Tasikmalaya	15,24	17	19,46	17	15,84	15	15,14	15	15,88	15

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (Diolah)

Tabel 5 di atas menunjukkan posisi Pemerintah Kota Bandung sebagai daerah dengan Rasio Desentralisasi Fiskal tertinggi pada tahun 2018, menyalib Pemerintah Kabupaten Bekasi yang selama empat tahun berturut-turut (2014-2017) sebagai daerah dengan Rasio Desentralisasi Fiskal tertinggi. Bila memperhatikan skala interval pada

Tabel 1, Kota Bandung dengan Rasio Desentralisasi Fiskal sebesar 43,29% pada tahun 2018 termasuk daerah dengan kemampuan keuangan “BAIK”.

Berikut ini disajikan pengelompokan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat berdasarkan Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal pada tahun 2018:

Tabel 6
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat
Berdasarkan Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun 2018

Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah	Nama Pemerintah Kabupaten/Kota
0 - 10	Sangat Kurang	(1) Kab. Garut, (2) Kab. Pangandaran, (3) Kab. Ciamis, (4) Kab. Tasikmalaya.
10 - 20	Kurang	(1) Kab. Bandung, (2) Kab. Purwakarta, (3) Kab. Bandung Barat, (4) Kab. Majalengka, (5) Kab. Cirebon, (6) Kab. Sumedang, (7) Kota Tasikmalaya, (8) Kab. Sukabumi, (9) Kota Banjar, (10) Kab. Cianjur, (11) Kab. Subang, (12) Kab. Indramayu, (13) Kab. Kuningan.
20 - 30	Cukup	(1) Kota Sukabumi, (2) Kab. Karawang, (3) Kota Cimahi
30 - 40	Sedang	(1) Kota Bogor, (2) Kab. Bogor, (3) Kota Depok, (4) Kota Cirebon.
40 - 50	Baik	(1) Kota Bandung, (2) Kota Bekasi, (3) Kab. Bekasi.
> 50	Sangat Baik	-

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (Diolah)

Dari Tabel 6 di atas dapat dilihat tiga besar daerah dengan kemampuan keuangan “BAIK”, dengan Pemerintah Kota Bandung di posisi pertama. Sebanyak tiga belas daerah dengan kemampuan keuangan “KURANG” atau 48,15% dari jumlah Kabupaten-Kota di Jawa Barat, dan empat daerah dengan kemampuan keuangan “SANGAT KURANG” atau 14,81% dari jumlah Kabupaten-Kota di Jawa Barat pada tahun 2018.

Bila ditelusuri komponen PAD yang menyumbang porsi besar pada realisasi PAD Pemerintah Kota Bandung tahun 2018 (berjumlah Rp 2,57 Triliun), yaitu dari hasil pemungutan Pajak Daerah (sebesar Rp 2,16 Triliun atau 84% dari PAD), diantaranya dari jenis Pajak Daerah: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp 589 Miliar (22,94%), Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 552 Miliar (21,49%), Pajak Restoran sebesar Rp 325 Miliar (12,65%), dan Pajak Hotel sebesar Rp 300 Miliar (11,70%). Kepala Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, Arif Prasetya, mengatakan kesadaran masyarakat Kota Bandung dalam membayar pajak telah meningkat. Walaupun demikian, Ia terus menghimbau masyarakat Kota Bandung untuk membayar pajak tepat waktu, karena dari pembayaran pajak tersebut sejalan pemanfaatannya untuk pembangunan infrastruktur yang begitu pesat di Kota Bandung (Istiqomah, 2019).

Analisis Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio ini menggambarkan besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber penerimaan dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah dalam membiayai Pengeluaran (Belanja) Daerah. Berikut disajikan Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat tahun 2014-2018:

Tabel 7
Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat
Tahun Anggaran 2014-2018

(rasio dalam %)

NO	NAMA PEMDA	2018		2017		2016		2015		2014	
		RASIO	PRKT								
1	Kab. Bandung	73,32	13	69,71	13	81,41	20	82,46	21	76,58	11
2	Kab. Bandung Barat	77,54	14	76,89	17	79,66	17	85,40	25	81,82	21
3	Kab. Bekasi	54,49	1	53,53	1	58,08	3	57,52	1	59,04	1
4	Kab. Bogor	55,62	3	56,31	3	60,19	4	64,01	6	64,99	4
5	Kab. Ciamis	86,53	26	78,69	20	90,99	27	82,71	22	86,62	25
6	Kab. Cianjur	61,37	7	63,89	8	72,34	12	76,31	13	79,84	19
7	Kab. Cirebon	78,31	16	75,12	16	79,67	18	79,89	19	79,23	16
8	Kab. Garut	83,03	24	81,10	24	85,48	24	84,44	24	83,50	23
9	Kab. Indramayu	81,97	22	66,26	12	71,81	11	78,42	16	79,78	18
10	Kab. Karawang	66,31	10	64,98	11	70,09	9	57,92	2	70,03	7
11	Kab. Kuningan	72,00	12	70,23	14	74,89	15	78,90	17	86,60	24
12	Kab. Majalengka	79,63	17	79,68	22	81,40	19	78,15	15	80,22	20
13	Kab. Pangandaran	79,69	18	90,35	27	85,86	26	81,69	20	91,86	27
14	Kab. Purwakarta	82,10	23	72,43	15	81,84	21	76,74	14	78,07	14
15	Kab. Subang	80,20	20	79,51	21	85,78	25	86,43	26	87,91	26
16	Kab. Sukabumi	77,87	15	77,75	18	83,60	22	84,05	23	77,03	13
17	Kab. Sumedang	79,90	19	77,90	19	85,02	23	79,56	18	78,46	15
18	Kab. Tasikmalaya	88,16	27	87,84	26	69,79	8	93,22	27	79,61	17
19	Kota Bandung	55,97	4	54,68	2	56,05	2	61,68	3	61,90	3
20	Kota Banjar	83,23	25	84,55	25	73,50	14	70,54	10	82,34	22
21	Kota Bekasi	54,70	2	58,14	6	55,92	1	61,98	4	61,84	2
22	Kota Bogor	57,09	5	56,50	4	60,28	5	63,68	5	67,61	5
23	Kota Cimahi	70,37	11	64,53	9	75,92	16	73,97	12	76,79	12
24	Kota Cirebon	65,91	9	64,75	10	70,46	10	68,94	9	70,78	8
25	Kota Depok	59,18	6	56,84	5	62,64	6	65,29	7	69,35	6
26	Kota Sukabumi	64,99	8	63,10	7	68,83	7	68,06	8	71,22	9
27	Kota Tasikmalaya	81,20	21	80,54	23	72,73	13	72,61	11	71,66	10

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (Diolah)

Tabel 7 di atas menunjukkan posisi Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah terendah pada tahun 2018. Bila dilihat dari fluktuasi tahun ke tahun, terlihat Kabupaten Bekasi dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan ketergantungan yang cukup berarti, walau di tahun 2018 terjadi peningkatan kembali. Daerah yang mengalami penurunan ketergantungan yang sangat berarti yaitu Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang pada tahun 2014 merupakan daerah dengan Rasio Ketergantungan tertinggi, dan pada tahun 2018 bisa berkurang hingga di bawah rata-rata ketergantungan nasional sebesar 80,1%.

Selanjutnya, daerah dengan Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah

tertinggi pada tahun 2018 yaitu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dengan Rasio Ketergantungan mencapai 88,16%. Terdapat tujuh daerah lain yang Rasio Ketergantungannya melebihi 80% atau dengan kata lain daerah yang sumber Pendapatan Daerahnya melebihi 80% bersumber dari transfer pemerintah pusat atau transfer antar daerah lainnya, yaitu Kabupaten Ciamis (86,53%), Kota Banjar (83,23%), Kabupaten Garut (83,03%), Kabupaten Purwakarta (82,10%), Kabupaten Indramayu (81,97%), Kota Tasikmalaya (81,20%), dan Kabupaten Subang (80,20%).

Berikut ini disajikan pengelompokan Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat berdasarkan Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018:

Tabel 8
Pengelompokan Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat Berdasarkan Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018

Rasio Ketergantungan (%)	Ketergantungan Keuangan PD	Nama Pemerintah Kabupaten/Kota
0 - 25	Sangat Rendah	-
25 - 50	Rendah	-
50 - 75	Sedang	(1) Kab. Bekasi, (2) Kota Bekasi, (3) Kab. Bogor, (4) Kota Bandung, (5) Kota Bogor, (6) Kota Depok, (7) Kab. Cianjur, (8) Kota Sukabumi, (9) Kota Cirebon, (10) Kab. Karawang, (11) Kota Cimahi, (12) Kab. Kuningan, (13) Kab. Bandung.
75 - 100	Tinggi	(1) Kab. Tasikmalaya, (2) Kab. Ciamis, (3) Kota Banjar, (4) Kab. Garut, (5) Kab. Purwakarta, (6) Kab. Indramayu, (7) Kota Tasikmalaya, (8) Kab. Subang, (9) Kab. Sumedang, (10) Kab. Pangandaran, (11) Kab. Majalengka, (12) Kab. Cirebon, (13) Kab. Sukabumi, (14) Kab. Bandung Barat.

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (Diolah)

Tabel 8 di atas menunjukkan belum ada daerah yang ketergantungan keuangannya masuk dalam kategori “RENDAH”. Namun bila ditelusuri komponen Pendapatan Daerahnya, ditemukan fakta seperti di Pemerintah Kabupaten Bekasi, realisasi Pendapatan Transfer dari Dana Alokasi Umum (komponen transfer terbesar dari pemerintah pusat) sebesar Rp 1,15 Triliun, sedangkan realisasi Pajak Daerah (komponen PAD) sebesar Rp 1,65 Triliun, luar biasa, hasil Pajak Daerah telah lebih besar dibanding Dana Alokasi Umum. Begitu pula Pemerintah Kota Bandung (Pajak Daerah sebesar Rp 2,16 T vs DAU sebesar Rp 1,64 T), Pemerintah Kota

Bekasi (Pajak Daerah sebesar Rp 1,58 T vs DAU sebesar Rp 1,21 T), dan Pemerintah Kabupaten Bogor (Pajak Daerah sebesar Rp 1,96 T vs DAU sebesar Rp 1,91 T).

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan target anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD tahun berjalan. Berikut disajikan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat tahun 2014-2018:

Tabel 9
Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat
Tahun Anggaran 2014-2018

(rasio dalam %)

NO	NAMA PEMDA	2018		2017		2016		2015		2014	
		RASIO	PRKT								
1	Kab. Bandung	114,01	3	122,91	15	118,26	5	126,26	3	136,95	12
2	Kab. Bandung Barat	113,47	4	177,88	2	126,55	1	115,99	11	98,90	25
3	Kab. Bekasi	105,81	6	120,81	16	117,76	6	139,15	1	137,68	11
4	Kab. Bogor	119,01	1	137,77	11	114,26	11	120,89	6	125,58	19
5	Kab. Ciamis	109,00	5	111,15	20	124,71	3	105,16	22	131,35	16
6	Kab. Cianjur	97,41	19	111,93	19	107,16	14	111,20	18	147,45	4
7	Kab. Cirebon	116,50	2	161,76	4	114,28	10	108,68	20	123,03	21
8	Kab. Garut	99,48	17	157,12	5	90,21	23	113,75	14	146,32	5
9	Kab. Indramayu	105,03	7	150,82	7	99,12	20	117,52	8	135,97	13
10	Kab. Karawang	90,04	22	110,58	22	106,34	15	113,00	15	114,11	23
11	Kab. Kuningan	96,54	20	141,66	10	100,46	18	109,33	19	141,81	9
12	Kab. Majalengka	98,46	18	118,96	17	88,98	24	108,18	21	144,43	7
13	Kab. Pangandaran	78,25	26	89,20	25	91,45	22	120,46	7	144,33	8
14	Kab. Purwakarta	78,96	25	58,33	27	50,17	27	51,98	27	72,02	27
15	Kab. Subang	103,06	12	173,59	3	116,21	7	125,02	4	173,92	3
16	Kab. Sukabumi	102,90	13	149,34	8	110,87	13	113,79	13	128,62	17
17	Kab. Sumedang	101,75	14	153,19	6	105,60	16	115,11	12	141,76	10
18	Kab. Tasikmalaya	100,19	16	190,31	1	120,78	4	117,08	9	176,29	2
19	Kota Bandung	75,69	27	84,12	26	78,24	26	88,84	26	97,34	26
20	Kota Banjar	88,47	23	95,55	24	97,15	21	116,15	10	185,69	1
21	Kota Bekasi	82,31	24	108,83	23	99,75	19	112,95	16	115,59	22
22	Kota Bogor	104,22	8	134,24	12	115,00	9	101,71	24	131,84	15
23	Kota Cimahi	103,21	10	142,01	9	126,02	2	130,27	2	124,98	20
24	Kota Cirebon	101,05	15	113,73	18	113,63	12	99,30	25	133,00	14
25	Kota Depok	103,80	9	131,71	13	115,96	8	122,13	5	111,99	24
26	Kota Sukabumi	103,15	11	110,85	21	86,95	25	103,01	23	128,44	18
27	Kota Tasikmalaya	93,87	21	129,54	14	102,58	17	111,63	17	146,29	6

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (Diolah)

Tabel 9 di atas menunjukkan posisi Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan Rasio Efektivitas PAD tertinggi pada tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan perolehan PAD pada tahun 2018 sebesar Rp 2,34 Triliun dan dapat direalisasikan melebihi target sebesar Rp 2,79 Triliun. Pemerintah Kota Bandung menjadi daerah dengan Rasio Efektivitas PAD terendah pada tahun 2018. Perbandingan antara

target perolehan PAD dan realisasi adalah Rp 3,39 Triliun dan Rp 2,57 Triliun. Terdapat selisih anggaran PAD yang tidak terealisasi sebesar Rp 826 Miliar.

Berikut ini disajikan pengelompokan Efektivitas Pemungutan PAD Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat berdasarkan Skala Interval Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2018:

Tabel 10
Pengelompokan Efektivitas Pemungutan PAD Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat Berdasarkan Skala Interval Rasio Efektivitas PAD Tahun 2018

Rasio Efektivitas PAD (%)	Kategori	Nama Pemerintah Kabupaten/Kota
< 75	Tidak Efektif	-
75 - 89	Kurang Efektif	(1) Kota Banjar, (2) Kota Bekasi, (3) Kab. Purwakarta, (4) Kab. Pangandaran, (5) Kota Bandung.
90 - 99	Cukup Efektif	(1) Kab. Garut, (2) Kab. Majalengka, (3) Kab. Cianjur, (4) Kab. Kuningan, (5) Kota Tasikmalaya, (6) Kab. Karawang.
100	Efektif	Kab. Tasikmalaya
> 100	Sangat Efektif	(1) Kab. Bogor, (2) Kab. Cirebon, (3) Kab. Bandung, (4) Kab. Bandung Barat, (5) Kab. Ciamis, (6) Kab. Bekasi, (7) Kab. Indramayu, (8) Kota Bogor, (9) Kota Depok, (10) Kota Cimahi, (11) Kota Sukabumi, (12) Kab. Subang, (13) Kab. Sukabumi, (14) Kab. Sumedang, (15) Kota Cirebon.

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (Diolah)

Tabel 10 di atas menunjukkan mayoritas pemerintah daerah di Jawa Barat telah efektif dan sangat efektif dalam merealisasikan target PAD. Jumlah realisasi lebih bila diakumulasikan dari 16 (enam belas) Kabupaten-Kota sebagaimana disebutkan di atas mencapai Rp 985 Miliar, dengan Pemerintah Kabupaten Bogor menyumbang realisasi lebih terbesar sebesar Rp 446 Miliar. Sedangkan bila diakumulasikan realisasi kurang dari 11 (sebelas) Kabupaten-Kota sebagaimana disebutkan di atas mencapai Rp 1,58 Triliun, dengan Pemerintah Kota Bandung menyumbang realisasi kurang terbesar sebesar Rp 820 Miliar, diikuti Pemerintah Kota

Bekasi sebesar Rp 430 Miliar, dan Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp 129 Miliar.

Analisis Rasio Belanja Modal

Rasio ini menggambarkan perbandingan besar pengeluaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode tahun anggaran dengan total Belanja Daerah secara keseluruhan. Melalui pengeluaran pemerintah daerah berupa Belanja Modal diharapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Berikut disajikan Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat tahun 2014-2018:

Tabel 11
Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat
Tahun Anggaran 2014-2018

(rasio dalam %)

NO	NAMA PEMDA	2018		2017		2016		2015		2014	
		RASIO	PRKT								
1	Kab. Bandung	13,94	20	12,80	26	12,27	27	15,38	26	12,38	25
2	Kab. Bandung Barat	10,01	26	15,50	23	15,38	25	18,02	19	17,73	17
3	Kab. Bekasi	16,88	13	20,04	12	26,58	5	27,63	4	31,07	1
4	Kab. Bogor	17,99	10	22,18	9	23,85	8	25,89	6	25,15	5
5	Kab. Ciamis	17,00	12	17,90	17	22,34	10	21,24	13	17,41	18
6	Kab. Cianjur	23,21	6	22,47	8	18,23	18	19,06	18	18,10	16
7	Kab. Cirebon	13,88	21	16,94	18	17,85	19	14,72	27	12,59	24
8	Kab. Garut	12,63	22	14,07	25	16,18	22	16,31	23	16,01	19
9	Kab. Indramayu	23,69	5	23,49	5	29,14	4	24,78	8	15,04	21
10	Kab. Karawang	16,17	15	17,97	16	15,45	24	24,71	10	18,81	14
11	Kab. Kuningan	8,84	27	12,47	27	13,14	26	16,72	22	11,95	26
12	Kab. Majalengka	24,41	3	22,96	6	23,99	7	28,13	3	26,36	4
13	Kab. Pangandaran	24,53	2	32,65	1	22,54	9	25,77	7	11,70	27
14	Kab. Purwakarta	11,88	24	20,58	10	15,87	23	19,85	16	21,43	11
15	Kab. Subang	16,58	14	16,47	21	19,94	16	20,82	14	22,32	9
16	Kab. Sukabumi	16,07	16	14,85	24	16,27	21	15,85	24	15,25	20
17	Kab. Sumedang	15,25	18	19,01	14	18,53	17	23,68	11	18,78	15
18	Kab. Tasikmalaya	15,15	19	16,60	19	22,07	11	16,91	20	23,11	8
19	Kota Bandung	17,63	11	16,58	20	21,51	13	24,76	9	21,90	10
20	Kota Banjar	24,10	4	27,33	3	32,12	3	26,89	5	23,44	6
21	Kota Bekasi	15,60	17	24,81	4	32,42	2	32,20	1	23,15	7
22	Kota Bogor	18,93	8	19,30	13	26,12	6	23,67	12	29,32	2
23	Kota Cimahi	18,54	9	20,18	11	20,25	15	16,82	21	14,53	22
24	Kota Cirebon	12,32	23	15,63	22	20,36	14	19,53	17	19,69	12
25	Kota Depok	27,86	1	32,08	2	36,97	1	28,26	2	28,94	3
26	Kota Sukabumi	11,81	25	18,71	15	17,78	20	15,71	25	12,66	23
27	Kota Tasikmalaya	19,56	7	22,81	7	21,94	12	20,80	15	19,01	13

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (Diolah)

Tabel 11 di atas menunjukkan posisi Pemerintah Kota Depok sebagai daerah dengan Rasio Belanja Modal tertinggi pada tahun 2018, yaitu mencapai 27,86%. Jumlah ini telah melebihi rata-rata Belanja Modal di pemerintahan daerah, sebagaimana disampaikan oleh Mahmudi (2016), yakni rata-rata Belanja Modal di pemerintahan daerah di kisaran 5% – 20% dari total Belanja Daerah. Lima daerah lain yang Rasio Belanja

Modalnya juga telah melebihi 20% pada tahun 2018, yaitu Kabupaten Pangandaran (24,53%), Kabupaten Majalengka (24,41%), Kota Banjar (24,10%), Kabupaten Indramayu (23,69%), dan Kabupaten Cianjur (23,21%).

Bila disajikan peringkat lima besar hasil pengukuran semua rasio keuangan daerah Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 12
Peringkat Lima Besar Hasil Pengukuran Semua Rasio Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat Tahun 2018

Rasio Desentralisasi Fiskal			Rasio Ketergantungan Keuangan PD		
PRKT	NAMA PEMDA	RASIO	PRKT	NAMA PEMDA	RASIO
1	Kota Bandung	43,29	1	Kab. Bekasi	54,49
2	Kota Bekasi	41,38	2	Kota Bekasi	54,70
3	Kab. Bekasi	40,32	3	Kab. Bogor	55,62
4	Kota Bogor	39,17	4	Kota Bandung	55,97
5	Kab. Bogor	38,28	5	Kota Bogor	57,09

Rasio Efektivitas PAD			Rasio Belanja Modal		
PRKT	NAMA PEMDA	RASIO	PRKT	NAMA PEMDA	RASIO
1	Kab. Bogor	119,01	1	Kota Depok	27,86
2	Kab. Cirebon	116,50	2	Kab. Pangandaran	24,53
3	Kab. Bandung	114,01	3	Kab. Majalengka	24,41
4	Kab. Bandung Barat	113,47	4	Kota Banjar	24,10
5	Kab. Ciamis	109,00	5	Kab. Indramayu	23,69

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data update 28 Januari 2020 (Diolah)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini berupaya untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat dengan menggunakan alat ukur rasio keuangan daerah, yang terdiri dari Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Belanja Modal. Dari hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran Rasio Desentralisasi Fiskal disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat mayoritas masih tergolong "KURANG", dimana sejumlah 17 (tujuh belas) Kabupaten-Kota atau 62,96% memiliki Rasio Desentralisasi Fiskal di bawah 20%. Komponen PAD yang menyumbang porsi besar pada realisasi PAD bersumber dari Pajak Daerah, berupa hasil pungutan BPHTB, PBB, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel, yang menunjukkan baiknya aktivitas ekonomi di masyarakat.
2. Berdasarkan hasil pengukuran Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah disimpulkan bahwa belum ada pemerintah daerah yang ketergantungan keuangannya terhadap dana transfer masuk dalam kategori "RENDAH". Sejumlah 13

(tiga belas) Pemerintah Kabupaten-Kota masuk kategori "SEDANG" dan 14 (empat belas) Pemerintah Kabupaten-Kota masuk kategori "TINGGI". Namun terdapat fakta menarik, yaitu sejumlah 4 (empat) Pemerintah Kabupaten-Kota yang hasil pungutan Pajak Daerah-nya (bagian dari PAD) lebih besar dari Dana Alokasi Umum (bagian dari transfer pemerintah pusat). Keempat Pemerintah Kabupaten-Kota dimaksud yaitu Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

3. Berdasarkan hasil pengukuran Rasio Efektivitas PAD disimpulkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Jawa Barat telah efektif dan sangat efektif dalam merealisasikan target PAD. Terdapat 16 (enam belas) Pemerintah Kabupaten-Kota yang realisasi PAD-nya melebihi target PAD, yang bila diakumulasikan jumlah realisasi lebihnya mencapai Rp 985 Miliar pada tahun 2018.
4. Berdasarkan hasil pengukuran Rasio Belanja Modal disimpulkan bahwa telah ada upaya dari Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat untuk memaksimalkan Belanja Modal. Sejumlah 6 (enam) Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat memiliki Rasio Belanja Modal melebihi rata-rata Belanja Modal di pemerintahan daerah.

Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan pada kedalaman pengujian, dan pengkajian. Penelitian berikutnya dapat menambahkan ruang lingkup pengujian atau pengkajian menjadi lebih komprehensif, misalnya dengan melakukan pengujian atau pengkajian pada determinan kinerja keuangan pemerintahan daerah ataupun dampak yang dihasilkan dari kondisi faktual kinerja keuangan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryandy, T. (2019). *Jadi Kawasan Industri dengan 4.000 Pabrik, Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bekasi Hanya 16%*. PikiranRakyat.Com. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01320036/jadi-kawasan-industri-dengan-4000-pabrik-ruang-terbuka-hijau-di-kabupaten-bekasi-hanya-16>
- Gewati, M. (2019). *Kemendagri Nobatkan Pemprov Jabar Jadi Pemerintah Daerah Terbaik*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/25/18591021/kemendagri-nobatkan-pemprov-jabar-jadi-pemerintah-daerah-terbaik?page=all>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*.
- Indonesia, R. (2015). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*.
- Indramawan, D. (2018). Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1247–1272.
- Istiqomah, Z. (2019). *Pertengahan Tahun, Realisasi Pajak Kota Bandung 43,2 Persen*. Republika.co.id. [https://republika.co.id/berita/pvpr76370/pertengahan-tahun-realisasi-pajak-kota-bandung-](https://republika.co.id/berita/pvpr76370/pertengahan-tahun-realisasi-pajak-kota-bandung-432-persen)
- Jabar, H. P. (2020). *Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. Jabarprov.Go.Id. <https://jabarprov.go.id>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Penerbit Andi.
- Muda, I., & Naibaho, R. (2018). Variables Influencing Allocation of Capital Expenditure in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126, 1315–1755.
- Olivia, G. (2018). *Menkeu: Ketergantungan APBD pada Dana Transfer Daerah Sangat Tinggi*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-ketergantungan-apbd-pada-dana-transfer-daerah-sangat-tinggi>
- UGM, F. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. In *Laporan Akhir Penelitian*.
- Zulkarnain, Z., & Andriansyah, R. (2018). Opini Audit BPK-RI dan Substansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. *Cakrawala*, 1(1), 58–74.